

Model Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Konsep *Hexahelix* di Provinsi Papua Barat Daya

La Ibal¹, Rahful A. Madaul², Nabila Nur Rifqah³

^{1,2,3}Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat.

E-mail: laibal@um-sorong.ac.id

Diterima: 04/11/2023.

Direview: 20/12/2023.

Diterbitkan: 30/12/2023.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Subject Area: *Regional Policy Planning*

Abstract

Southwest Papua Province, part of Indonesia, faces significant developmental challenges, especially extreme poverty influenced by its adherence to customary law. With a poverty rate of 14.2 percent, this research employs problem-solving methods like qualitative and descriptive approaches. The study reveals a collaborative approach to combat extreme poverty in the region, involving various stakeholders and supported by additional contributors. This coalition includes regional authorities, academics, businesses, private individuals, media, communities, and traditional institutions. Further support comes from banks, NGOs, markets, local industries, and small-scale entrepreneurs. Each party has a distinct role: the government oversees, academics provide frameworks, businesses support, communities drive progress, media spreads information, and traditional institutions plan interventions. This multi-stakeholder strategy is crucial in addressing extreme poverty in Southwest Papua Province, harnessing diverse roles for sustainable change.

Keywords: *Collaboration Model; Extreme Poverty; Hexahelix Concept; Southeast Papua.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Penduduk miskin Nasional berdasarkan data BPS pada tahun 2022 berjumlah sebesar 26,16 juta jiwa atau sebanyak 9,54 persen dari total banyaknya penduduk Indonesia (TNP2K, 2022). Masalah kemiskinan sesuai dengan tujuan pertama dari SDGs bahwa tanpa kemiskinan yang menginstruksikan bahwa pengakhiran kemiskinan pada tahun 2024. Di antara 17 tujuan, tujuan SDGs ini adalah tujuan akhir dari semua tujuan SDGs dan merupakan syarat untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang harus lebih diprioritaskan. Untuk menerapkan kebijakan yang optimal untuk mengakhiri kemiskinan, upaya harus dilakukan secara strategis dan inklusif. Untuk mencapai tujuan SDGs hingga tahun 2030, pemerintah memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan yang efektif dan adaptif untuk menanggulangi kemiskinan yang ada (Islamiyah, 2021).

Pemerintah mengutamakan pengurangan kemiskinan ekstrem. Penyampaian Presiden Republik Indonesia pada Maret 2020 menetapkan tujuan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Ukuran Kemiskinan ekstrem menggunakan metode kemiskinan absolut dengan mengikuti

definisi *World Bank* yaitu nilai PPP di bawah 1,9 dolar per hari (TNP2K, 2022). Kondisi hidup yang sangat sulit yang disebabkan oleh kemiskinan ekstrem termasuk akses yang terbatas ke makanan, perumahan yang layak, pendidikan, dan layanan medis.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru di Indonesia yang tentu memiliki banyak tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan ekstrem. Wilayah ini terdiri dari beragam suku bangsa dan memiliki potensi alam yang besar, namun juga menghadapi masalah infrastruktur yang terbatas dan akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kabupaten Sorong memiliki angka kemiskinan ekstrem sebesar 16.42 persen, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 8.85 persen, Kabupaten Tambora sebesar 22.44 persen, Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen, Kota Sorong sebesar 7.35 persen, dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 7.26 persen, sehingga rata-rata kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 14,2 persen. Ini artinya di Provinsi Papua Barat Daya memiliki kemiskinan ekstrem di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 4.0 persen pada tahun 2021, sedangkan target penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat mencapai target kemiskinan ekstrem hingga 0% atau secara optimis target sebesar-besarnya maksimal 1% di tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan pembentukan tim penanggulangan kemiskinan ekstrem. Melalui PP 15/2010 dan Inpres No. 4 tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah diamanahkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah yang keanggotanannya yang meliputi pemerintah/OPD, masyarakat, swasta/bisnis maupun kelompok lainnya. Artinya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama demi kepentingan masyarakat secara sistematis, terencana dan sinergi atau kolaborasi (Permendagri 53/2020). Melalui hal ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengalokasikan dana Rp 40 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Pencapaian pada tahun 2024 terhadap target kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya tercapai nol persen. Untuk itu diperlukan model kolaborasi antar aktor pendukung pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem diantaranya akademisi, hukum adat, bisnis/swasta, media, dan masyarakat. Model ini akan menjadi landasan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Model ini mendorong kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Model *Collaborative* mengusulkan pendekatan kolaboratif dari berbagai aktor. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda dalam upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Beberapa penelitian telah menerapkan model kolaborasi pentahelix (Pratama et al., 2023; Tadung, 2023; Handayani et al., 2023; Lantika, 2019; Megawati et al., 2022). Pada penelitian ini menambah kolaborasi hukum adat sebagai metode kolaborasi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Konsep Hexahelix mengacu pada pendekatan pengembangan berkelanjutan yang melibatkan enam sektor utama, yaitu pemerintah, akademisi, hukum adat, bisnis/swasta, media, dan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, konsep ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan dan kemajuan di Papua Barat Daya diperhitungkan dengan baik dan dikelola secara terpadu.

Oleh karena itu, model ini mungkin juga mencakup analisis mendalam tentang masalah-masalah spesifik yang dihadapi Papua Barat Daya, seperti kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, rendahnya tingkat lapangan kerja formal, masalah kesehatan, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Model ini kemungkinan besar juga mempertimbangkan peluang dan potensi pengembangan ekonomi lokal yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Pentingnya model ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menerapkan konsep *Hexahelix*, model ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem.

Tinjauan Pustaka

Model kolaborasi mencakup partisipasi, motivasi, tujuan bersama, kepercayaan internal, dan komitmen terhadap proses sebagai elemen utama, sementara konsensus, monitoring, transparansi, interdependensi, dan kepemimpinan dianggap sebagai faktor pendukung kolaborasi. Dalam konteks model kolaborasi birokrasi, terdapat beberapa aspek kunci, yaitu: (a) Motivasi; (b) Interdependensi, di mana orang saling bergantung satu sama lain; (c) Kepercayaan, yang mencakup legitimasi internal untuk kepentingan bersama; dan (d) Kepemimpinan, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengajak orang lain (Mulyaningsih, 2023). Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama dan interaksi di antara berbagai elemen, termasuk individu, lembaga, dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerjasama ini, mereka saling mengalami akibat dan mendapatkan manfaat. Nilai-nilai yang menjadi dasar kolaborasi meliputi kesamaan tujuan, persepsi yang serupa, kemauan untuk menjalani proses bersama, memberikan manfaat satu sama lain, kejujuran, kasih sayang, dan berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat (Astuti, 2020).

Pemerintah mengutamakan pengurangan kemiskinan ekstrem. Penyampaian Presiden Republik Indonesia pada Maret 2020 menetapkan tujuan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Ukuran Kemiskinan ekstrem menggunakan metode kemiskinan absolut dengan mengikuti definisi *World Bank* yaitu nilai PPP di bawah 1,9 dolar per hari (TNP2K, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat, bisnis, media, dan akademisi serta lembaga adat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (Angraini et al., 2022). Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat secara langsung dalam dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya. Wawancara tersebut melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan akademisi, sektor bisnis/swasta, media massa, lembaga adat, dan masyarakat yang berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua

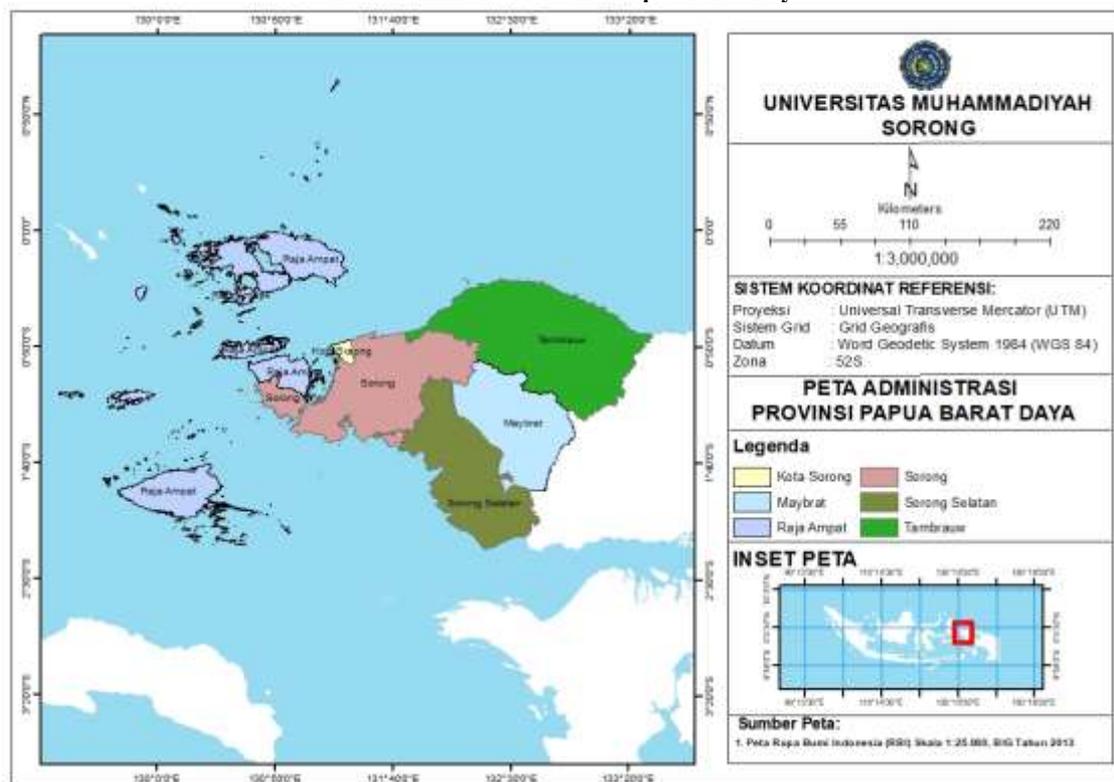
Barat Daya. Pada tahap analisis data, peneliti menjalankan proses pemahaman menyeluruh terhadap data penelitian yang telah terkumpul. Analisis data ini melibatkan pencarian dan pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, deskripsi unit-unit data, penyusunan sintesis, identifikasi pola, penentuan relevansi, pemilihan fokus pembelajaran, dan pembuatan kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan pihak lain. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti merujuk pada model analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, yang mencakup tiga fase kegiatan dari pengurangan data, penyajian data, hingga verifikasi kesimpulan (Rijali, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Provinsi Papua Barat Daya

Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambraw, dan Kabupaten Raja Ampat. Peta Administrasi Provinsi Papua Barat Daya disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Peta Administrasi Provinsi Papua Barat Daya



Ibukota Provinsi Papua Barat Daya terletak di Kota Sorong. Provinsi memiliki luas wilayah dengan total luas wilayah 38.820,49 km², dengan Kabupaten Tambraw terluas dengan luas 11.529,18 km² dan Kota Sorong merupakan wilayah yang sangat kecil dengan total luas wilayah 656,64 km². Luas wilayah berdasarkan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Luas wilayah berdasarkan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Pembagian		
			Distrik	Kelurahan	Kampung
1	Maybrat	5.461,69	24	1	259
2	Raja Ampat	8.034,44	24	4	117
3	Sorong	6.544,23	30	26	226
4	Sorong Selatan	6.594,31	15	2	121
5	Tambrau	11.529,18	29	-	216
6	Kota Sorong	656,64	10	41	-
Total		38.820,49	132	74	939

Sumber: BPS Kabupaten/Kota, 2023

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru di Indonesia yang tentu memiliki banyak tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan ekstrem. Wilayah ini terdiri dari beragam suku bangsa dan memiliki potensi alam yang besar, namun juga menghadapi masalah infrastruktur yang terbatas dan akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kabupaten Sorong memiliki angka kemiskinan ekstrem sebesar 16.42 persen, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 8.85 persen, Kabupaten Tambrau sebesar 22.44 persen, Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen, Kota Sorong sebesar 7.35 persen, dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 7.26 persen, sehingga rata-rata kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 14,2 persen.

Penyusun Kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan TKPK yang berada di Bapperida Provinsi Papua Barat Daya melalui Rencana Strategis (Renstra). Dalam penelitian (6) bahwa implementasi aktor terbagi dalam lima kategori aktor yaitu aktor yang ditunjuk, aktor yang dipilih, organisasi penelitian, kelompok kepentingan, dan media. Provinsi Papua Barat daya terdiri dari berbagai suku misalnya Suku Moi, Suku Ayamaru, Suku Matbat, Suku Ma'ya, Suku Abun, berbagai suku biak, dan lain-lain. Dengan banyaknya berbagai suku tersebut maka perlu keterlibatan suku dalam penanggulangan permasalahan wilayah di Papua Barat Daya salah satunya penanggulangan kemiskinan ekstrem, maka tentu penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab bersama karena sebagaimana target kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2024 adalah nol persen.

Sebagai daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan ekstrem. Data kemiskinan ekstrem Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan kabupaten kota adalah sebagai berikut: (a) Kabupaten Sorong memiliki angka kemiskinan ekstrem sebesar 16.42 persen; (b) Kabupaten Sorong Selatan sebesar 8.85 persen; (c) Kabupaten Tambrau sebesar 22.44 persen; (d) Kabupaten Maybrat sebesar 22.89 persen; (e) Kota Sorong sebesar 7.35 persen; dan (f) Kabupaten Raja Ampat sebesar 7.26 persen, sehingga rata-rata kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 14,2 persen. Ini artinya di Provinsi Papua Barat Daya memiliki kemiskinan ekstrem di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 4.0 persen pada tahun 2021, sedangkan target penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai target kemiskinan ekstrem hingga 0 persen

atau setidaknya target maksimal 1% pada tahun 2024. Olehnya itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2
Hasil Proses Kolaborasi Antar Multiaktor untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya

Proses Kolaborasi	Aktor	Temuan
Negosiasi dengan aktor dalam proses kolaborasi multiaktor dan aktor pendukung	Pemerintah	Pembentukan TKPK telah ada namun belum ada kolaborasi dengan aktor lain
	Pelaku	Belum ada kolaborasi dengan aktor lain
	Bisnis/Swasta	
	Akademisi	Belum ada kolaborasi dengan aktor lain
	Masyarakat	Belum ada kolaborasi dengan aktor lain
	Media Massa	Belum ada kolaborasi dengan aktor lain
	Lembaga Adat/Suku	Belum ada kolaborasi dengan aktor lain
Komitmen untuk berkolaborasi dengan multiaktor dan aktor pendukung	Pemerintah	Memiliki kolaborasi dengan antar pemerintah atau kolaborasi internal, dengan pelaku bisnis/swasta dan lembaga adat sifatnya koordinasi, sedangkan dengan masyarakat berkomitmen dengan menggunakan bantuan dengan sebaik-baiknya, serta dengan media massa hanya dalam bentuk penyebaran informasi atau berita
	Pelaku	Kolaborasi dengan pemerintah melalui dukungan program pemerintah melalui CSR dan pajak. Kolaborasi dengan akademisi, masyarakat, Lembaga adat, dan media belum nampak
	Bisnis/Swasta	
	Akademisi	Berkolaborasi dengan pemerintah melalui kerjasama penelitian yang berhubungan dengan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi akademisi aktor lain belum terlalu nampak
	Masyarakat	Masyarakat belum menunjukkan komitmen secara baik karena belum terlibat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
	Media Masa	Kolaborasi dengan pemerintah melalui penyampaian informasi terkait kegiatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem
	Lembaga Adat/Suku	Komitmen dengan aktor lain seperti pemerintah melalui dukungan kepada program pemerintah, sedangkan dengan aktor lain belum ada komitmen
Implementasi dalam berkolaborasi dengan multiaktor dan aktor pendukung	Pemerintah	Pemerintah masih belum menunjukkan implementasi dengan aktor lain hanya dalam tahap koordinasi seperti pelaku bisnis, media massa, dan lembaga adat. Tetapi penyaluran bantuan berupa PKH, Raskin, bantuan rumah layak sudah sampai di masyarakat, sedangkan pada akademisi dalam rangka pembiayaan penelitian dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrem
	Pelaku	Implementasinya hanya melakukan koordinasi dengan pemerintah sedangkan dengan aktor lain belum ada
	Bisnis/Swasta	
	Akademisi	Implementasi dengan pemerintah melalui pelaksanaan penelitian yang berhubungan dengan kemiskinan ekstrem, sedangkan dengan aktor lain belum ada yang terjadi
	Masyarakat	Implementasi kolaborasi masyarakat yaitu menjalankan setiap program pemerintah namun dengan aktor lain belum terlalu nampak
	Media Masa	Implementasi media massa dengan pemerintah bersifat informatif, dengan aktor lain belum nampak
	Lembaga Adat/Suku	Implementasi dengan pemerintah bersifat dukungan program pemerintah, sedangkan dengan aktor lain belum nampak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2. Kolaborasi antar multiaktor belum menunjukkan hubungan yang sangat kuat, masih didominasi dengan kondisi koordinatif. Proses kolaborasi antar multiaktor terdiri dari negosiasi, komitmen, dan implementasi secara umum proses kolaborasinya bersifat koordinatif. Kolaborasi yang diterapkan antar multiaktor belum diterapkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebanyak 50 responden menunjukkan proses kolaborasi belum nampak secara efektif pada tataran masyarakat. Pernyataan masyarakat dalam kolaborasi dengan aktor lain dalam pengentasan kemiskinan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Pernyataan masyarakat dalam kolaborasi dengan aktor lain dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah
1	Kategori kondisi sebagai warga miskin	50	0	50
2	Ada bantuan yang di terima dari pemerintah baik pemerintah Desa/Kelurahan Maupun Pemerintah Daerah/Nasional (PKH, Raskin, dll)	18	32	50
3	Ada bantuan lain selain (PKH, Raskin, dll) misalnya infrastruktur (perbaikan jalan)	8	42	50
4	Mendapatkan bantuan dari pelaku bisnis	16	34	50
5	Ada program pelatihan kewusahaan dari pelaku bisnis	10	40	50
6	Ada usaha sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari	36	14	50
7	Ada yang dari kampus datang meneliti tentang kemiskinan ekstrem	12	38	50
8	Ada dari kampus datang memberikan pelatihan terkait pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pendapatan	4	46	50
9	Ada pihak dari Bank yang dapat menawarkan bantuan modal	32	18	50
10	Ada wartawan/ media yang datang mewawancari terkait kondisi bapak/ibu	12	38	50
11	Ada program dari lembaga Adat di tempat Ibu/Bapak untuk mengatasi kemiskinan	8	42	50

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Model kolaborasi yang dirancang dalam penelitian ini yaitu kolaborasi antar multiaktor dan aktor pendukung untuk pengentasan kemiskinan ekstrem agar pada tahun 2024 paling tidak persentase kemiskinan esktrm di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 1 persen. Kolabolasi melalui program-program kegiatan untuk strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilaksanakan melalui kolaborasi sektor/aktor untuk pengurangan permasalahan sosial ekonomi dan peningkatan minat beli bagi orang miskin. Kolaborasi multiaktor tersebut terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Bisnis/Swasta, Media Massa, Masyarakat, serta Lembaga Adat, sedangkan aktor pendukung adalah Lembaga Bank/Permodalan Madani, LSM/NGO, Pasar, Industri Rumahan, dan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga. Kolaborasi dapat dilakukan menyentuh semua aspek kehidupan seperti fase kelahiran, fase hidup, dan fase usia tutup. Pada fase kelahiran para aktor dapat bekerja sama memberikan jaminan kesehatan. Pada fase hidup para aktor dapat memberikan bantuan dana untuk RTS maupun pelatihan dan pendampingan dalam membuat produk berbasis industri rumahan dan menjadi wirausaha tingkat rumah tangga. Pada fase tutup usia para aktor dapat memberikan santunan kematian agar dapat meringankan beban sosial masyarakat terutama masyarakat miskin.

Peran Pemerintah

Model kolaborasi pemerintah dengan aktor lain dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui 2 metode yaitu (1) kolaborasi dengan multiaktor yang dalam konsep hexahelix yaitu akademisi, pihak swasta/bisnis, lembaga adat, media massa, dan masyarakat; serta (2) Kolaborasi dengan aktor pendukung yaitu lembaga pembiayaan bank/non-bank, pasar, industri rumahan, dan LSM/NGO. Dalam kolaborasi pemerintah mendukung kegiatan para aktor-aktor tersebut dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program-program seperti tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4
Kolaborasi Pemerintah dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Pemerintah dengan Multiaktor	<p>Akademisi</p> <p>Pihak Swasta/Bisnis</p> <p>Lembaga Adat</p> <p>Media Massa</p> <p>Masyarakat</p>	<p>Kolaborasi dengan akademisi melalui pemberian dana penelitian yang berhubungan dengan penanganan kemiskinan ekstrem. Dana diberikan melalui LP3M universitas yang penelitiannya tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga diharapkan nantinya bisa melahirkan penelitian-penelitian yang bisa membantu pemerintah dalam menentukan dan membuat program-program yang tepat sasaran.</p> <p>Kolaborasi dengan pihak swasta/bisnis, Pemerintah perlu menguatkan dalam bidang kerjasama penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan mensosialisasikan program CSR agar tepat sasaran terutama pada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Keberhasilan CSR tersebut tentu pemerintah harus melakukan pengawasan dan pengendalian.</p> <p>Pemerintah dan pihak adat diharapkan dalam bekerjasama atau berkolaborasi dalam membangun kerjasama dan kemitraan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal, serta mengoptimalkan potensi tersebut dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana di kampung-kampung agar permasalahan aksesibilitas dapat terselesaikan. Selain itu, pemerintah harus terus gencar dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, pertanian dan teknologi terbarukan, serta program pemberdayaan masyarakat adat.</p> <p>Media massa sebagai sarana dalam implementasi kebijakan pemerintah memiliki peran sebagai sarana eksternal dalam pemberian informasi terkait kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pemerintah harus memberikan ruang kepada media massa karena media massa sebagai wadah dalam mensosialisasikan kegiatan pemerintah yang telah dikerjakan pada masyarakat terutama penanggulangan kemiskinan ekstrem</p> <p>Berkolaborasi dalam membantu masyarakat yang tergolong sebagai kemiskinan ekstrem. Masyarakat yang mampu, Pemerintah dapat mengajak bekerja sama dalam hal pembiayaan kehidupan masyarakat tersebut, seperti pemberian bantuan berbasis pengelolaan dan pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pemberdayaan melalui akses pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan lain-lain.</p>
2	Kolaborasi Antar Pemerintah dengan Aktor Pendukung	<p>Lembaga Bank/Permodalan Madani</p> <p>Pasar</p> <p>Industri Rumahan</p> <p>LSM/NGO</p>	<p>Pemerintah dengan Lembaga Bank/Permodalan Madani dapat berkolaborasi dalam penguatan kerjasama dalam kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Melalui Lembaga Bank/Permodalan Madani diharapkan dapat memecahkan kemiskinan di masyarakat dengan bantuan permodalan dengan pinjaman dalam bentuk kredit kecil maupun mikro</p> <p>Pasar sebagai tempat pertukaran ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana seperti aksesibilitas menuju pasar, sarana pasar, prasarana pasar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti menjual hasil-hasil pertaniannya, hasil industri rumahan, dan lain-lain</p> <p>Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pengembangan industri rumahan seperti kemudahan dalam pengurusan izin, pemberian modal usaha, sistem pemasaran produk, serta pendampingan dalam manajemen keuangan. Adanya Industri Rumahan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem</p> <p>Pemerintah dapat memberikan ruang kepada LSM/NGO dalam mengembangkan programnya seperti program penyelamatan masalah pangan dan pengetasan kemiskinan. Pemerintah harus mendukung kegiatan NGO/LSM untuk beroperasi.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Peran Akademisi

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem akademisi berperan penting untuk mengatasinya yaitu melalui penelitian dan pengabdian, serta pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat. Model kolaborasi yang dapat dilakukan akademisi melalui kerjasama dengan multiaktor seperti pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Selain itu melalui aktor pendukung seperti industri rumahan dan LSM/NGO. Model kolaborasi melalui program-program yang dapat dilakukan oleh akademisi seperti pada Tabel 5.

Tabel 5
Kolaborasi Akademisi dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Akademisi dengan Multiaktor	Pemerintah Lembaga Adat Masyarakat	Penentuan model penanggulangan kemiskinan ekstrem Model pemberian bantuan kepada RTS Pengabdian dalam bentuk pelatihan kepada RTS tentang produk yang bersifat UMKM Pemberdayaan melalui pengabdian masyarakat pada kampung-kampung yang memiliki potensi lokal Pelatihan tingkat masyarakat dalam mengolah hasil SDA Pendampingan dalam tata kelola SDA dan Aset Desa Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan wirausaha dan industri rumahan Melakukan riset terkait masalah kemiskinan ekstrem dan solusinya Mendesain program tepat sasaran melalui KKN dan Program Kampus Merdeka
2	Kolaborasi Antar Akademisi dengan Aktor Pendukung	Industri Rumahan LSM/NGO	Pelatihan dan pendampingan melalui Program Kampung Binaan dengan mengutamakan produk industri Rumahan sebagai program Utama Membuat media promosi pemasaran hasil industri rumahan Bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem misalnya kolaborasi dalam penelitian Kolaborasi dalam pengabdian seperti pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan SDA dan UMKM

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pelaku Bisnis/Swasta

Pelaku bisnis/swasta dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberian CSR dan pembayaran pajak yang tepat waktu agar dapat dimanfaatkan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pelaku bisnis/swasta dapat melakukan pelatihan dan pendampingan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk membuat produk berbasis industri rumahan dan pendampingan dalam pembentukan wirausaha tingkat rumah tangga. Model kolaborasi yang akan dilakukan oleh Pelaku bisnis/swasta melalui kolaborasi multiaktor dan melalui aktor pendukung. Program kolaborasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Kolaborasi Pelaku Bisnis/Swasta dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Pelaku Bisnis dengan Multiaktor	Pemerintah Lembaga Adat Masyarakat	Pemberian CSR pada Pemerintah tepat waktu agar tersalurkan dengan baik Kerjasama dalam pengetasan kemiskinan ekstrem seperti pengadaan workshop bisnis yang ditujukan untuk warga miskin Pelatihan tingkat masyarakat dalam mengolah hasil SDA berbasis bisnis Pendampingan dalam pemasaran produk hasil olahan yang lebih efektif Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan wirausaha dan industri rumahan Pembuatan program ekonomi kreatif untuk meningkatkan UMKM Bantuan langsung kepada masyarakat yang merupakan kategori kemiskinan ekstrem
2	Kolaborasi Antar Pelaku Bisnis dengan Aktor Pendukung	Industri Rumahan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga LSM/NGO	Pendampingan untuk pembuatan produk dan pemasaran hasil industri Rumahan Pelatihan dan pendampingan dalam pelatihan pembuatan dan pemasaran produk Partisipasi dan kerjasama pemberdayaan dalam pengetasan kemiskinan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masyarakat Adat/Lembaga Adat

Masyarakat Adat/Lembaga Adat adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat daya memiliki berbagai adat/suku yaitu Suku Ayamaru, Suku Maya, Suku Matbat, Suku Moi, dan lain-lain. Suku-suku tersebut memiliki kepala suku yang memiliki peraturan berdasarkan sukunya masing-masing. Model pengentasan kemiskinan ekstrem yang melalui program-program yang dapat bekerja sama dengan multiaktor dan aktor pendukung karena lembaga adat mengetahui kondisi di masyarakat dan dapat memberikan data yang lebih akurat terkait kondisi masyarakatnya yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Model kolaborasi lembaga adat dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Kolaborasi Masyarakat Adat/Lembaga Adat dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Masyarakat adat dengan Multiaktor	Pemerintah	Mendukung pemerintah dalam hal penguatan pengaturan seperti peraturan adat untuk keberlangsungan masyarakat Membantu pemerintah dalam mengawal pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pembentukan dan pemberdayaan lembaga pelatihan maupun lembaga keuangan Membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan produktif di Perkampungan
		Akademisi	Mengajak Akademisi untuk mengeksplor dan mengembangkan potensi wilayah melalui Penelitian dan Pengabdian
		Masyarakat	Mengupayakan kesejahteraan masyarakat untuk mengetaskan kemiskinan eskترم melalui pendataan yang tepat
2	Kolaborasi Antar Masyarakat adat dengan Aktor Pendukung	Industri Rumahan	Membuat program industri rumahan berbasis potensi lokal
		Wirausaha Tingkat Rumah Tangga	Mendata dan mengembangkan wirausaha tingkat rumah tangga
		LSM/NGO	Membantu dan memberi ruang kepada NGO/LSM dalam pengentasan kemiskinan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Media Massa

Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan media massa. Media massa memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem misalnya mempromosikan program pemerintah serta memberikan kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak miskin. Pemberitaan dan promosi dari media massa tentu sangat diharapkan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Model kolaborasi media massa dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Kolaborasi Media Massa dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Media dengan Multiaktor	Pemerintah	Membantu pemerintah mempromosikan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem Memberi informasi kepada publik terkait program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
		Masyarakat	Mengangkat masalah kemiskinan ekstrem melalui berita Mengkampanyekan kondisi masyarakat ekstrem untuk lebih diperhatikan oleh aktor-aktor terkait
2	Kolaborasi Antar Media dengan Aktor Pendukung	LSM/NGO	Mempromosikan kegiatan-kegiatan LSM/NGO dalam pengentasan kemiskinan ekstrem Memberi informasi kepada publik terkait program-program LSM/NGO dalam pengentasan kemiskinan ekstrem

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masyarakat

Peran masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan cara mendukung program-program baik dari pemerintah maupun dari pihak lain serta memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. Model kolaborasi masyarakat dengan multiaktor dan aktor pendukung disajikan pada Tabel 9.

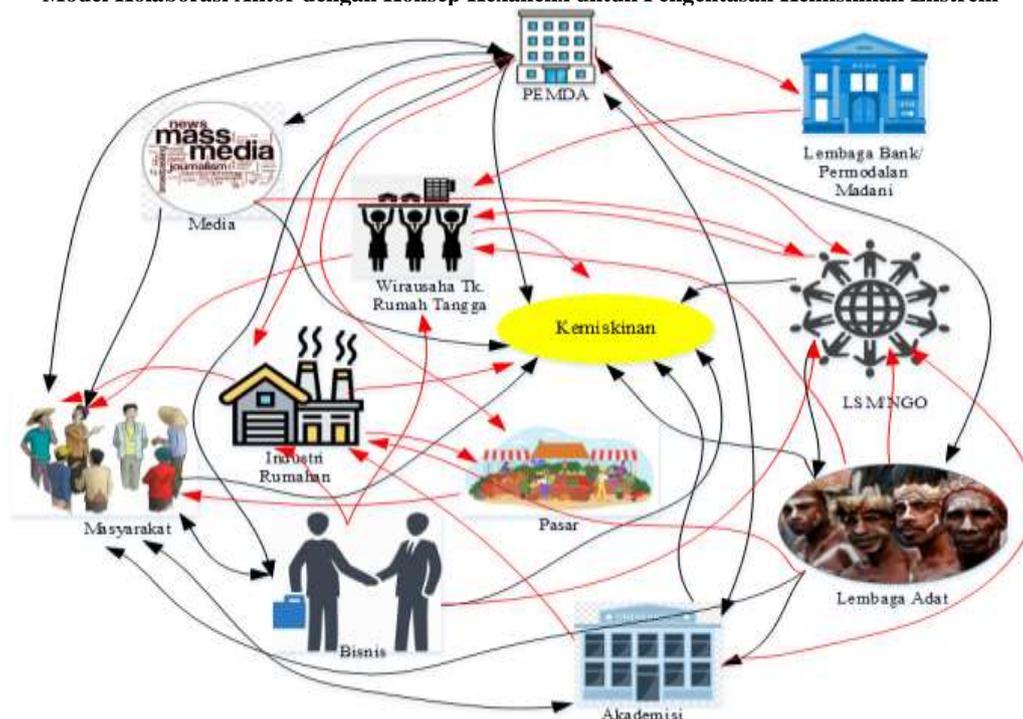
Tabel 9
Kolaborasi Masyarakat dengan Multiaktor dan aktor Pendukung

No.	Nama Aktor	Kolaborasi Aktor	Model Kolaborasi
1	Kolaborasi Antar Masyarakat dengan Multiaktor	Pemerintah Pelaku Bisnis/Swasta Akademisi	Membantu pemerintah mengawasi bantuan yang telah disalurkan Ikut menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem dengan menjalankan semua program yang telah ditujukan oleh pemerintah Membantu pelaku bisnis/swasta untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan Memberikan ruang kepada akademisi untuk melakukan pengabdian di tingkat masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan Turut serta dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan oleh akademisi
2	Kolaborasi Antar Masyarakat dengan Aktor Pendukung	Industri Rumahan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga	Membuat hasil produksi yang berbasis industri rumahan Membentuk kelompok wirausaha tingkat rumah tangga

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan penjelasan di atas maka Model Kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya menggunakan model timbal balik antar multi aktor dengan dukungan aktor pendukung. Kolaborasi multiaktor terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Bisnis/Swasta, Media Massa, Masyarakat, serta Lembaga Adat, sedangkan aktor pendukung adalah Lembaga Bank/Permodalan Madani, LSM/NGO, Pasar, Industri Rumahan, dan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga.

Gambar 2
Model Kolaborasi Aktor dengan Konsep Hexahelix untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem



Peran pemerintah, akademisi, pelaku bisnis/swasta, masyarakat adat, media massa, dan masyarakat berdasarkan Model Hersey-Blanchard melalui 4 mekanisme yaitu: (a) Instruktif atau perintah kerja yang merupakan perwujudan gagasan awal untuk industri rumahan, wirausaha tingkat rumah tangga, dan UMKM; (b) Pendampingan. Pendampingan sebagai skala pemula yang dapat dilakukan oleh aktor untuk mendampingi masyarakat dalam pengembangan industri rumah tangga maupun wirausaha tingkat rumah tangga; (c) Dukungan. Dukungan dapat dilakukan oleh para aktor untuk meningkatkan skala industri rumahannya. Skala ini disebut dengan skala berkembang; serta (d) Pendelegasian. Proses ini merupakan proses yang sudah maju namun jarang terjadi untuk industri rumahan.

Keempat tahap ini pemerintah sebagai leading aktor perlu menerapkan kebijakan pada masing-masing mekanisme untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Bentuk program diarahkan untuk meningkatkan minat kewirausahaan, produksi bahan lokal, dan metode pemasaran hasil produk untuk menumbuhkan metode penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemanfaatan SDA lokal untuk industri rumahan serta pembentukan wirausaha tingkat rumah tangga. Model yang akan diterapkan adalah model kolaborasi timbal-balik yaitu saling mendukung dalam pengentasan kemiskinan ekstrem secara komprehensif. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengembangkan industri rumahan karena kultur masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi seperti (1) Modal gotong royong yang dijalin dimasyarakat dapat memberikan pembangunan baik sosial maupun ekonomi; (2) Banyaknya SDM dan SDA yang dapat dijadikan sebagai modal pembentukan industri rumahan.

Target penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai target kemiskinan ekstrem hingga 0 persen atau setidaknya target maksimal 1% pada tahun 2024. Olehnya itu, pemerintah melalui pemerintah Provinsi melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Untuk itu perlu melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor untuk mengatasi hal tersebut (Kelvin et al., 2022; Arma, 2023), serta memahami tupoksi masing-masing stakeholders untuk membangun kepercayaan masyarakat dan selalu diadakan evaluasi (Hidayasa et al., 2023). Kolaborasi yang diharapkan adalah kolaborasi yang memacu untuk lebih cepat serta kolaborasi dengan menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif (Tamrin M. Husni, 2023). Untuk itu, peran dari aktor-aktor untuk penggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah sebagai controller dan regulator yang memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan ekstrem seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, perancangan program, pengawasan, dan evaluasi; (2) Akademisi sebagai konseptor menyiapkan model dan konsep penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah; (3) Pelaku Bisnis/Swasta sebagai enabler yaitu berfungsi sebagai katalisator dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat; (4) Masyarakat/Komunitas sebagai akselerator dalam hal memberikan dukungan, perhatian, maupun kesadaran dalam pemberian bantuan dari aktor lain; (5) Media sebagai informator melalui dukungan dalam informasi yang seoptimal mungkin karena media sangat erat hubungannya dengan masyarakat terutama bagi UMKM; (6) Lembaga Adat sebagai strategislator dalam mendata, memberikan bantuan, sampai dengan tahap evaluasi serta memonitoring penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain.

Kesimpulan

Model Kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya menggunakan model timbal balik antar multi aktor dengan dukungan aktor pendukung. Kolaborasi multiaktor terdiri dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Bisnis/Swasta, Media Massa, Masyarakat, serta Lembaga Adat, sedangkan aktor pendukung adalah Lembaga Bank/Permodalan Madani, LSM/NGO, Pasar, Industri Rumahan, dan Wirausaha Tingkat Rumah Tangga. Peran dari dari aktor-aktor untuk penggulungan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya adalah Pemerintah sebagai controller dan regulator, Akademisi sebagai konseptor, Pelaku Bisnis/Swasta sebagai enabler, Masyarakat/ Komunitas sebagai akselerator, Media sebagai informator, Lembaga Adat sebagai strategislator.

Daftar Pustaka

- Anggraini, O., Aprianty, H., Putra, B. M., Purnawan, H., & Dani, R. (2022). Evaluation of the Family Hope Program in an Effort to Improve the Quality of Life for Poor Families. *Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 29–34. <https://doi.org/10.58222/jossh.v1i1.37>
- Arma, N. A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik*, 10, 492–502.
- Astuti, W. dan R. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. 161.
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://10.0.131.165/jiwbp.v13i2.3329>
- Hidayasa, Q., Kurnianingsih, F., & Hendrayady, A. (2023). Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(2), 83–90. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.107>
- Islamiyah, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencapai Sustainable Development Goals Di Kabupaten Pangkep*. 10, 6.
- Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 1–15. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Larantika, A. A. A. D. (2019). Kolaborasi Aktor Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. In *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Megawati, S., Yusriadi, Y., Syukran, A., Rahaju, T., & Hussien, N. (2022). Adiwiyata Program Innovation through Penta Helix Approach. *Education Research International*, 2022(4), 7–9. <https://doi.org/10.1155/2022/7223314>
- Mulyaningsih. (2023). Model Kolaborasi Karakteristik Budaya Organisasi Sharing Dalam Perilaku Birokrat di Masa Pandemi (Studi Kasus Desa-Desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung). *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 57–80.
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to

- Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Tadung, E. (2023). Opportunities and Challenges of Pentahelix Collaboration for Poverty Alleviation in Indonesia: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*, 2023, 289–303. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14122>
- Tamrin M. Husni, L. L. (2023). Pengelolaan KEE Ujung Pangkah Melalui Kolaborasi Stakeholders. In *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- TNP2K. (2022). *Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024*. 1–20.